

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aminuddin Ilmar. 2020. *Perbuatan Hukum Pemerintahan*. Phinatama Media. Makassar.

Amran Suadi. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta

Andi Pangerang dan Syafa'at Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Rajawali Pers. Depok.

Angger Sigit Pramuki dan Meylani Cahyaningsih. 2016. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.

Erna Setijaningrum. 2009. *Inovasi Pelayanan Publik*. PT. Medika Aksara Globalindo.

Fahmi Amrusi. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Nusamedia. Bandung

Haw Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT.Raja Grafindo Persada

Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. PT. Alumni. Bandung

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta

Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi. 2011. *Dekonstruksi Hukum Pengawasan Pemerintahan Daerah (The Turning Point of Local Autonomy)*, Universitas Brawijaya Press. Malang.

Ni'Matul Huda, R. N. 2011. *Teori & Pengujian Peraturan PerundangUndangan*. Nusamedia. Bandung.

Nurmavani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.



HR. 2009. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soerjono soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Alfabeta. Depok.

_____ 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cetakan ke19*. Alfabeta. Bandung.

Tanto Lailam. 2012. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Prident. Yogyakarta.

Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 9 Nomor 4

Agus Kusnadi. *Re-Evaluasi Hubungan Pengawasan Pusat dan Daerah Setelah Berlakunya UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Arena Hukum. Vol. 10 Nomor 1

Amiruddin. *Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor*. Jurnal Gema Kampus Ilmu Administrasi. Vol.11

Dudung Abdullah. 2016. *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*. Jurnal Hukum Positium. Vol.1 Nomor 1

Erlis Milta Rin Sandole. 2015. *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan PT.Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Terminal BBM*, Vol. 3 Nomor 3

Ferry Firdaus dan Fajar Iswahyudi. 2010. *Aksesibilitas Dalam Pelayanan Untuk Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus*. Jurnal Borneo Administrator. Vol 6 Nomor 3



Arie. 2016. *An Approach of Legisprudence Theory to Assess the Quality of Local Regulation*. Hasanuddin Law Review, Vol 2 , Edisi 3

- Mih Gandara. 2020. *Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat*. Jurnal Khazanah Hukum. Vol. 2 Nomor 3
- M. Isnain Umasangaji. 2016. *Partisipasi Masyarakat Pada Program Pos Pelayanan Terpadu Di Desa Waitina Kecamatan Manggoli Timur*. Jurnal Holistik. Vol. 9 Nomor 18
- Nunung Munawarah. 2019. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis*. Jurnal Media Birokrasi. Vol. 1 Nomor. 2.
- Restu Dedis Ahdhan. 2014. *Implementasi Undang-Undang N0.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Vol.2 Nomor 2.
- Suhartoyo. *Implementasi Fungsi Pelayanan Publik Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*. Jurnal Administrative Law dan Governance. Vol. 2 Nomor 1
- Yayat Rokayat. 2017. *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Pasir Jambu*. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi. Vol. 11 Nomor 02

Skripsi

- Kunto Prabowo. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Situs Internet

<http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/7386/BAB%20II.PDF> Diakses Pada Tanggal 31 Januari Pukul 21.32

<http://repository.uin-suska.ac.id/19920/7/7.%20BAB%20ii%20%281%29.pdf> diakses pada tanggal 2 februari pukul 19.58



repository.unimus.ac.id/2678/5/BAB%20ii.pdf diakses pada tanggal 2 pukul 21.37

Supriadi Ibrahim, *Bupati Bone Resmikan Pos Pelayanan Terpadu 'Sao Masiga'*,
<https://daerah.sindonews.com/artikelamp/makassar/25299/bupatibone-resmikan-pos-pelayanan-terpadu-sao-masiga> diakses pada tanggal 9 februari pukul 21.50

<https://dpmpstp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=3> Diakses pada tanggal 19 juli pukul 19.40

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu.

Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Pos Layanan Terpadu Masyarakat " *Sao Masiga*"

Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone

Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran



Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone

Lain-Lain

Wawancara Andi Wawan (Kasubag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bone) (Selasa 20 Juni 2023)

Wawancara Syamsul Ramlan (Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone) (Kamis 08 Juni 2023)

Wawancara Faisal (Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone) (Senin 11 Juli 2022)



LAMPIRAN



1.1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

Nomor : 3605/UN4.5.1/PT.00/2023
Lampiran : -
Hal : **PENELITIAN**

Makassar, 24 Mei 2023

Kepada
Yth. : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sul Sel
di-
TEMPAT

Dengan hormat,

Disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Unhas :

Nama : WINDI PUTRI WANANDA
No. Pokok : B021181018
No. HP : 082192674817
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Alamat : DESA HULO KEC. KAHU KAB.BONE
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Marthen Ario ,S.H., M.H.
2. Eka Merdekawati Djafar ,S.H., M.H.

Akan menyusun Skripsi yang merupakan bagian dari kurikulum Fakultas Hukum Unhas. Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/difasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN POS PELAYANAN TERPADU TERHADAP KEEFEKTIFAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BONE MENURUT PERATURAN BUPATI NO.16/2019

Demikian Surat Pengantar penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Unhas;
2. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas;



Generated by law_information_system @un has 2023-05-24 07:41:57

1 dari 1

24/05/2023, 07.33





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 17873/S.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bone
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 3605/UN4.5.1/PT.00/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **WINDI PUTRI WANANDA**
Nomor Pokok : B021181018
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km, 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN POS PELAYANAN TERPADU TERHADAP KEEFEKTIFAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BONE MENURUT PERATURAN BUPATI NO.16/2019 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Mei s/d 29 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



2.1 Bukti Penelitian



3.1 Bukti Kuesioner

Kuesioner Penelitian Pengawasan Pos Pelayanan Terpadu Terhadap Keefektifan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bone Menurut Peraturan Bupati No.16/2019.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Perkenalkan saya Windi Putri Wananda Mahasiswa Prodi Hukum Administrasi Negara 2018 Unhas, saat ini saya sedang melakukan penelitian terkait Pelaksanaan Pengawasan Pos Pelayanan Terpadu Terhadap Keefektifan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bone Menurut Peraturan Bupati No.16/2019.

Atas hal tersebut, mohon kesediaan partisipasi Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini, mengenai informasi terkait Pengawasan Pos Pelayanan Terpadu Terhadap Keefektifan Pelayanan Publik Di Kabupaten Bone Menurut Peraturan Bupati No.16/2019.

Semua informasi yang diterima bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk keperluan akademik.
Terima Kasih Banyak Atas Partisipasi dan Kesediaan Bapak/Ibu.



Apakah Anda Mengetahui Tentang Keberadaan Pos Pelayanan Terpadu "Sao Masiga"?

